

Nomor sengketa /Tanggal	Pemohon/informasi yang dimohon	Termohon	Hasil putusan
<p>001/I/KIProv-LPG-PSP/2023</p> <p>10 Januari 2023</p>	<p>Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Metro (HMI)</p> <p>Informasi berupa salinan data Nilai tes tertulis (CAT) Peserta calon anggota panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kota Metro Tahun 2022;</p>	<p>Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro (BAWASLU)</p>	<p>Pencabutan Perkara</p> <p>Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali dalam persidangan maka permohonan dinyatakan gugur</p>
<p>001/I/KIProv-LPG-PS/2023</p> <p>6 Januari 2023</p>	<p>Yeni Setiawati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk melihat warkah penerbitan atau dasar penerbitan SHM No : 5893/KD - Untuk melihat surat ukur dan peta bidang objek tanah SHM No. 5893/KD - Untuk melihat KTP atas nama yang tertera di SHM No. 5893/KD - Untuk meminta fotocopy buku tanag SHM No. 5893/KD tersebut terdaftar atau tidak di kantor pertanahan kota bandar lampung. 	<p>Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung</p>	<p>Putusan Mediasi</p> <p>Bahwa Termohon bersedia memberikan beberapa informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berupa surat keterangan status SHM No. 5893/KD yang berisikan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Pemilik Tanah b. Luas bidang tanah c. Letak bidang tanah
<p>002/II/KIProv-LPG-PS/2023</p> <p>13 Februari 2023</p>	<p>Pemantau Keuangan Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran Tahun 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 2. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Anggaran tahun 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 disertai dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana kegiatan dan Anggaran Desa 	<p>Desa Kota Bumi Tengah Barat Kec. Kota Bumi Kab .Lampung Utara</p>	<p>Putusan Akhir</p> <p>Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020, 2021 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, Rencana Kerja Biaya Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020, 2021. 3. Ringkasan Laporan realisasi APBdes dan catatan atas laporan keuangan, ringkasan laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, ringkasan informasi tentang

	<ul style="list-style-type: none"> b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan c. Rencana Kerja Biaya <p>3. Perubahan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban (LPJ) tentang APBDes dan Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 disertai dengan : Laporan realisasi APBDes dan Catatan atas laporan keuangan Laporan realisasi kegiatan, dan Daftar program sektoral, Program daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa;</p> <p>4. Laporan pengelolaan aset desa seperti yang dimaksud pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan lampirannya, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Buku inventaris Aset Desa b. Daftar Aset Desa yang dihapus c. Keputusan Kepala Desa tentang penghapusan Aset Inventaris Desa <p>5. Dokumen Kontrak pada pengadaan Barang dan Jasa baik melalui penyedia jasa maupun swakelola seperti yang dimaksud pada peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang</p>		<p>program daerah dan program lain yang masuk ke Desa Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.</p> <p>4. Buku Inventaris Aset Desa, Daftar Aset Desa yang dihapus, keputusan kepala desa tentang penghapusan Aset Inventaris Desa Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.</p> <p>5. Dokumen pengadaan barang dan jasa terkait penanggulangan dan pencegahan covid-19 Tahun 2020 dan 2021.</p> <p>6. Laporan dana BLT Desa Tahun 2020 berupa Jumlah dan Sumber Bantuan Baik APBD, APBN dan Sumber Lainnya, Rencana Kegiatan Penggunaan Dana Covid, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Penerima Bantuan, Laporan Realisasi Pengeluaran Anggaran.</p>
--	--	--	---

	<p>dan jasa di desa Tahun anggaran 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat perintah kerja b. Rencana anggaran biaya c. Spesifikasi pekerjaan atau barang d. Gambar rencana e. Bukti Pembayaran toko meterial atau penyedia barang atau pihak-pihak ke tiga <p>6. LPJ BUMDes dan usaha-usaha Desa lainnya Tahun 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021;</p> <p>7. Laporan Penggunaan dana Bantuan penanggulangan dan pencegahan Virus Corona Covid 19 yaitu Dana BLT Desa Tahun 2020.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah dan Sumber bantuan baik APBD, APBN dan Sumber lainnya b. Rencana kegiatan Penggunaan Dana Covid c. Rencana Anggaran Biaya d. Daftar Penerima Bantuan e. Laporan Realisasi Pengeluaran Anggaran 		
<p>003/IV/KIProv-LPG-PS/2023</p> <p>05 April 2023</p>	<p>Pemantau Keuangan Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran Tahun 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 9. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Anggaran 	<p>Desa Bengkulu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan</p>	<p>Putusan Akhir</p> <p>Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran Tahun 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa,

	<p>tahun 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 disertai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Rencana kegiatan dan Anggaran Desa e. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan f. Rencana Kerja Biaya <p>10. Perubahan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban (LPJ) tentang APBDes dan Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 disertai dengan : Laporan realisasi APBDes dan Catatan atas laporan keuangan Laporan realisasi kegiatan, dan Daftar program sektoral, Program daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa;</p> <p>11. Laporan pengelolaan aset desa seperti yang dimaksud pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan lampirannya, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Buku inventaris Aset Desa e. Daftar Aset Desa yang dihapus f. Keputusan Kepala Desa tentang penghapusan Aset Inventaris Desa <p>12. Dokumen Kontrak pada pengadaan</p>		<p>Rencana Kerja Kegiatan Desa, Rencana Kerja Biaya Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020, 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. Ringkasan Laporan realisasi APBdes dan catatan atas laporan keuangan, ringkasan laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, ringkasan informasi tentang program daerah dan program lain yang masuk ke Desa Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 4. Buku Inventaris Aset Desa, Daftar Aset Desa yang dihapus, keputusan kepala desa tentang penghapusan Aset Inventaris Desa, Daftar Status Penggunaan Aset Desa, dan Peta Lokasi Aset Desa Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 5. Laporan dana BLT Desa Tahun 2020 berupa Jumlah dan Sumber Bantuan Baik APBD, APBN dan Sumber Lainnya, Rencana Kegiatan Penggunaan Dana Covid, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Penerima Bantuan, Laporan Realisasi Pengeluaran Anggaran.
--	--	--	--

	<p>Barang dan Jasa baik melalui penyedia jasa maupun swakelola seperti yang dimaksud pada peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa Tahun anggaran 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> f. Surat perintah kerja g. Rencana anggaran biaya h. Spesifikasi pekerjaan atau barang i. Gambar rencana j. Bukti Pembayaran toko meterial atau penyedia barang atau pihak-pihak ke tiga <p>13. LPJ BUMDes dan usaha-usaha Desa lainnya Tahun 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021;</p> <p>14. Laporan Penggunaan dana Bantuan penanggulangan dan pencegahan Virus Corona Covid 19 yaitu Dana BLT Desa Tahun 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> f. Jumlah dan Sumber bantuan baik APBD, APBN dan Sumber lainnya g. Rencana kegiatan Penggunaan Dana Covid h. Rencana Anggaran Biaya i. Daftar Penerima Bantuan j. Laporan Realisasi Pengeluaran Anggaran 		
004/IV/KIProv-LPG-PS/2023	<p>Pemantau Keuangan Negara</p> <p>15. Peraturan Desa tentang APBDes dan</p>	Desa Tiuh Balak 2 Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan	<p>Putusan Akhir</p> <p>Mengabulkan permohonan Pemohon untuk</p>

<p>05 April 2023</p>	<p>Perubahan APBDes Tahun Anggaran Tahun 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021</p> <p>16. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Anggaran tahun 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 disertai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> g. Rencana kegiatan dan Anggaran Desa h. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan i. Rencana Kerja Biaya <p>17. Perubahan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban (LPJ) tentang APBDes dan Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 disertai dengan : Laporan realisasi APBDes dan Catatan atas laporan keuangan Laporan realisasi kegiatan, dan Daftar program sektoral, Program daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa;</p> <p>18. Laporan pengelolaan aset desa seperti yang dimaksud pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan lampirannya, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> g. Buku inventaris Aset Desa 		<p>sebagian berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, Rencana Kerja Biaya Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020, 2021. 3. Ringkasan Laporan realisasi APBdes dan catatan atas laporan keuangan, ringkasan laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, ringkasan informasi tentang program daerah dan program lain yang masuk ke Desa Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 4. Buku Inventaris Aset Desa, Daftar Aset Desa yang dihapus, keputusan kepala desa tentang penghapusan Aset Inventaris Desa ,Daftar Status penggunaan Aset Desa dan Peta Lokasi Aset Desa Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 5. Laporan dana BLT Desa Tahun 2020 berupa Jumlah dan Sumber Bantuan Baik APBD, APBN dan Sumber Lainnya, Rencana Kegiatan Penggunaan Dana Covid, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Penerima Bantuan, Laporan Realisasi Pengeluaran Anggaran
----------------------	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> h. Daftar Aset Desa yang dihapus i. Keputusan Kepala Desa tentang penghapusan Aset Inventaris Desa <p>19. Dokumen Kontrak pada pengadaan Barang dan Jasa baik melalui penyedia jasa maupun swakelola seperti yang dimaksud pada peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa Tahun anggaran 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> k. Surat perintah kerja l. Rencana anggaran biaya m. Spesifikasi pekerjaan atau barang n. Gambar rencana o. Bukti Pembayaran toko meterial atau penyedia barang atau pihak-pihak ke tiga <p>20. LPJ BUMDes dan usaha-usaha Desa lainnya Tahun 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021;</p> <p>21. Laporan Penggunaan dana Bantuan penanggulangan dan pencegahan Virus Corona Covid 19 yaitu Dana BLT Desa Tahun 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> k. Jumlah dan Sumber bantuan baik APBD, APBN dan Sumber lainnya l. Rencana kegiatan Penggunaan Dana Covid m. Rencana Anggaran Biaya n. Daftar Penerima Bantuan 		
--	---	--	--

	o. Laporan Realisasi Pengeluaran Anggaran		
005/IV/KIProv-LPG-PS/2023 14 April 2023	<p>Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan RI (DPC-PWRI)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 2. Rencana Anggaran Biaya 3. Desain Gambar; dan Surat Keputusan penetapan Pengurus P3TGAI pengerjaan Pembangunan Saluran Irigasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pekon Watas Pekon Padang Dalam Kecamatan Balik Bukit b. Pekon Negeri Ratu, Pekon Suka Raja Kecamatan Batu Brak c. Pekon Kenali dan Pekon Serungkuk Kecamatan Belalau Tahun 2022 	Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Provinsi Lampung	<p>Putusan Sela</p> <p>Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa <i>a quo</i>.</p>
006/IV/KIProv-LPG-PS/2023 14 April 2023	<p>Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan RI (DPC-PWRI)</p> <p>Rincian data Perencanaan dan Realisasi Anggaran Dana Daerah Pekon Batu Kebayan Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, dan 2022</p>	PPID Pekon Batu Kebayan Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat	<p>Putusan akhir</p> <p>Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.</p> <p>Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa:</p> <p>Ringkasan Data Perencanaan dan Realisasi Anggaran Dana Daerah Pekon Batu Kebayan Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021.</p> <p>Merupakan Informasi Publik Terbuka (bersifat aktif) yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Termohon.</p>
007/V/KIProv-LPG-PS/2023	<p>Wulidah, S.H</p> <p>Permohonan salinan Informasi Warkah</p>	ATR/BPN Kabupaten Tulang Bawang	<p>Putusan Sela</p>

	Sertifikat Hak Milik Nomor 162		Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa <i>a quo</i> .
008/VII/KIProv-LPG-PS/2023 26 Juli 2023	Dewan Pimpinan Cabang Laskar Indonesia Kabupaten Lampung Timur a. Salinan Surat Tanda Setor (STS) Pengembalian Kerugian Negara/ Daerah atas kelebihan bayar 14 ASN di BPKAD b. Salinan bukti-bukti telah di salurkan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke pemerintah desa.	BPKAD Kabupaten Lampung Timur	Proses
009/VIII/KIProv-LPG-PS/2023 28 Juli 2023	Agus Safrudin a. Mengundang Walikota Bandar Lampung agar tidak diwakilkan b. Membawa aturan (Undang-Undang) yang menghatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang membidangi lingkungan hidup boleh mengabaikan untuk tidak melakukan SIDAK DI MASYARAKAT yang menyangkut kepentingan masyarakat	Walikota Bandar Lampung	Proses
010/VIII/KIProv-LPG-PS/2023	Agus Safrudin	DPRD Kota Bandar Lampung	Proses

28 Juli 2023	Meminta informasi tindakan tegas atas dugaan penyalahgunaan jabatan (kode etik) pada ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung		
--------------	--	--	--